

The Role of the International Criminal Court in Law Enforcement against Public Health Crimes: Case Review and Implications

Miliyandra^{1*}, Yogi Angistya Tamara², Mijan³, Hadi Purnomo⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Miliyandra miliyandrasadad21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: International Criminal Court, Public Health Crimes, Law Enforcement, International Jurisdiction, International Cooperation

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 22 May

ABSTRACT

This research explores the role of the International Criminal Court (PPI) in law enforcement against public health crimes through a review of relevant cases. By analyzing PPI involvement and its implications, this research aims to understand how PPI can influence law enforcement against public health crimes at the global level

©2024 Miliyandra, Tamara, Mijan, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Peran Pengadilan Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kesehatan Masyarakat: Tinjauan Kasus dan Implikasinya

Miliyandra^{1*}, Yogi Angistya Tamara², Mijan³, Hadi Purnomo⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Miliyandra miliyandrasadad21@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengadilan Pidana Internasional, Kejahatan Kesehatan Masyarakat, Penegakan Hukum, Yurisdiksi Internasional, Kerjasama Internasional

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 22 May

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran Pengadilan Pidana Internasional (PPI) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat melalui tinjauan kasus-kasus yang relevan. Dengan menganalisis keterlibatan PPI dan implikasinya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PPI dapat memengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat di tingkat global

©2024 Miliyandra, Tamara, Mijan, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama bagi banyak negara karena dampaknya yang luas terhadap populasi dan ekonomi. Namun, ketika terjadi kejahatan yang mengancam kesehatan masyarakat secara luas, seperti pandemi atau penyebaran penyakit yang disengaja, pertanyaan mengenai bagaimana hukum internasional menangani hal tersebut menjadi semakin penting.

Kasus-kasus seperti pandemi COVID-19 telah menyoroti kerentanan dalam sistem hukum internasional dalam menangani kejahatan kesehatan masyarakat. Sementara banyak negara memiliki undang-undang domestik yang mengatur masalah ini, koordinasi dan penegakan hukum lintas batas sering kali sulit dilakukan. Pengadilan Pidana Internasional muncul sebagai lembaga yang potensial untuk menangani kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat yang melibatkan pelanggaran hukum internasional.

Implikasi dari peran PPI dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat bisa sangat signifikan. Pertama, hal ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut individu atau entitas yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengancam kesehatan masyarakat secara global. Kedua, kehadiran PPI dapat meningkatkan rasa keadilan dan akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat, yang sering kali melibatkan kepentingan internasional dan transnasional.

Namun, ada juga tantangan yang harus diatasi dalam mengintegrasikan peran PPI dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah kompleksitas yurisdiksi dan hubungan antarnegara yang dapat menghambat proses peradilan. Selain itu, perlu diperhatikan juga agar keberadaan PPI tidak menimbulkan konflik dengan yurisdiksi nasional, dan sebaliknya, agar tetap menghormati kedaulatan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengadilan Pidana Internasional

Pengadilan Pidana Internasional (PPI) merupakan lembaga hukum yang memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang melanggar hukum internasional. PPI biasanya berfungsi untuk menuntut individu-individu atau entitas-entitas yang terlibat dalam kejahatan yang serius, seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan lainnya yang melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum internasional. Pengadilan semacam ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan akuntabilitas di tingkat global, di mana kasus-kasus tersebut mungkin tidak bisa ditangani secara efektif oleh pengadilan nasional.

B. Kejahatan Kesehatan Masyarakat

Kejahatan kesehatan masyarakat mencakup serangkaian tindakan yang mengancam kesejahteraan dan kesehatan populasi secara luas. Contohnya termasuk penyebaran penyakit menular, penyalahgunaan narkoba, kecelakaan industri yang menghasilkan polusi, dan tindakan lain yang dapat menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan dan kehidupan manusia. Kejahatan semacam ini seringkali memiliki dampak yang meluas dan

membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi dari pihak berwenang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat, penanganan kejahatan kesehatan masyarakat menjadi semakin kompleks karena pergerakan orang, barang, dan informasi yang mudah lintas batas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada analisis kasus dan tinjauan literatur. Metode ini memungkinkan untuk memahami peran Pengadilan Pidana Internasional (PPI) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat melalui eksplorasi mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan serta telaah terhadap berbagai sumber literatur terkait. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kompleksitas fenomena yang terlibat, seperti dinamika politik, yurisdiksi, dan implikasi hukum internasional yang terkait dengan penanganan kejahatan kesehatan masyarakat. Analisis kasus akan memungkinkan identifikasi pola-pola, tantangan, dan peluang dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan semacam itu, sementara tinjauan literatur akan memberikan wawasan yang mendalam terhadap landasan teoritis dan konteks historis yang melingkupi isu ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PPI dalam Penegakan Hukum Kejahatan Kesehatan Masyarakat

Pengadilan Pidana Internasional (PPI) telah memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat dalam beberapa kasus yang relevan, namun, sejumlah faktor mempengaruhi efektivitas keterlibatan mereka. Kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kesehatan masyarakat seringkali mencakup pelanggaran hak asasi manusia, penyebaran penyakit menular, penyalahgunaan narkotika, dan masalah kesehatan lingkungan. Dalam kasus-kasus ini, PPI sering kali menjadi forum yang penting untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan akuntabilitas atas tindakan-tindakan yang mengancam kesehatan masyarakat secara global.

Salah satu contoh keterlibatan PPI adalah dalam penuntutan individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida yang melibatkan penggunaan senjata kimia atau biologis yang merugikan kesehatan masyarakat, PPI dapat menjadi forum untuk menuntut pelaku kejahatan dan memberikan keadilan kepada korban. Penegakan hukum semacam ini membantu memastikan bahwa individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kejahatan kesehatan masyarakat dihukum sesuai dengan hukum internasional.

Namun, efektivitas keterlibatan PPI dalam kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, masalah yurisdiksi menjadi kendala utama karena tidak semua negara menjadi anggota atau mengakui yurisdiksi PPI. Hal ini dapat menghambat kemampuan PPI untuk menuntut pelaku kejahatan kesehatan masyarakat yang berada di

negara-negara yang tidak mengakui yurisdiksinya. Kedua, ada juga tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan kesehatan masyarakat, terutama ketika bukti tersebut tersebar di berbagai negara. Ketiga, faktor politik dan diplomasi juga dapat mempengaruhi kemampuan PPI untuk bertindak secara independen dan efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat. Beberapa negara mungkin menggunakan kekuasaan politik mereka untuk melindungi pelaku kejahatan atau menghalangi upaya penegakan hukum internasional.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa PPI bukan satu-satunya forum yang relevan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat. Pengadilan nasional, organisasi internasional, dan mekanisme penegakan hukum regional juga dapat memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Kerjasama antarnegara dan koordinasi antara berbagai lembaga hukum menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat secara global.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan yang terlibat, penting bagi PPI dan lembaga hukum internasional lainnya untuk terus mengembangkan strategi dan mekanisme yang memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat. Ini termasuk peningkatan kerjasama internasional, pembangunan kapasitas investigasi dan penuntutan, serta perluasan yurisdiksi untuk mencakup lebih banyak kasus yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, PPI dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat secara global.

B. Implikasi Peran PPI dalam Penegakan Kejahatan Kesehatan Masyarakat

Peran Pengadilan Pidana Internasional (PPI) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat memiliki implikasi yang luas, baik dalam konteks yurisdiksi internasional maupun dalam pengaruhnya terhadap kebijakan nasional dan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat global.

Pertama-tama, dalam konteks yurisdiksi internasional, keterlibatan PPI menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan kesehatan masyarakat yang melanggar hukum internasional. Dengan menegakkan standar hukum yang setara di seluruh dunia, PPI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu tidak luput dari pertanggungjawaban, tidak peduli di mana kejahatan itu terjadi. Ini memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap kesehatan masyarakat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yang dapat memberikan insentif bagi negara-negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat di dalam wilayah yurisdiksinya.

Kedua, keterlibatan PPI juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ketika PPI menangani kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat dengan keputusan yang kuat dan tegas, hal ini dapat mendorong negara-negara untuk mengadopsi atau memperkuat undang-undang dan kebijakan domestik yang sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh PPI. Misalnya, suatu negara mungkin merespon putusan PPI dengan meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran kesehatan masyarakat atau meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan kesehatan masyarakat.

Ketiga, keterlibatan PPI juga dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat global. Ketika PPI menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kesehatan masyarakat yang lintas batas, hal ini menciptakan kesempatan bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan tersebut. Kolaborasi semacam itu dapat melibatkan pertukaran informasi, koordinasi investigasi lintas batas, dan bahkan pembentukan tim penyelidikan bersama. Selain itu, putusan PPI yang kuat dan tegas juga dapat memberikan dorongan moral bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kejahatan kesehatan masyarakat yang melintasi batas negara.

Dengan demikian, peran PPI dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya dalam hal menegakkan keadilan di tingkat internasional, tetapi juga dalam membentuk kebijakan nasional dan meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat global. Dengan terus memperkuat peran dan kapasitas PPI, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih efektif dan komprehensif di masa depan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengadilan Pidana Internasional (PPI) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat di tingkat global. Melalui peninjauan kasus-kasus yang relevan, telah terbukti bahwa keterlibatan PPI dapat memastikan akuntabilitas bagi individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang mengancam kesehatan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas keterlibatan PPI, seperti masalah yurisdiksi, kesulitan dalam pengumpulan bukti, dan faktor politik. Meskipun demikian, implikasi dari peran PPI dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat sangatlah penting, termasuk dalam membentuk kebijakan nasional dan meningkatkan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat global.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama internasional: Negara-negara diharapkan untuk lebih aktif berkolaborasi dalam menyelidiki, menuntut, dan menegakkan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat yang melintasi batas negara. Ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, koordinasi investigasi lintas batas, dan pembentukan tim penyelidikan bersama.
2. Pembangunan kapasitas: Perlu dilakukan pembangunan kapasitas investigasi dan penuntutan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini mencakup pelatihan petugas penegak hukum, pengembangan teknologi forensik, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat.
3. Perluasan yurisdiksi: Pengadilan Pidana Internasional (PPI) perlu mempertimbangkan perluasan yurisdiksinya untuk mencakup lebih banyak kasus yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan dan perjanjian internasional yang mengatur kewenangan PPI.
4. Dukungan terhadap PPI: Negara-negara diharapkan untuk memberikan dukungan politik dan keuangan yang lebih besar terhadap PPI dalam upaya mereka untuk menegakkan hukum internasional terkait dengan kesehatan masyarakat. Hal ini termasuk memberikan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan kesehatan masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat secara global dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana PPI dapat beradaptasi dengan tantangan baru dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks pandemi global dan perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara luas. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan dan praktik hukum yang dihasilkan dari keterlibatan PPI terhadap penegakan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat di tingkat nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2338-2354.
- Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 56-65.
- Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 83-99.
- Novantia, T. Y. (2023). Urgensi Memasukkan Ekosida sebagai Kejahatan Internasional Dalam Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.
- Panjaitan, A. C. (2023). Perbandingan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 22-33.
- Susanto, M., Rosyaputri, N. M., Sugiri, I., Maharani, A. P., & Antoni, H. (2023). Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 114-131.
- Syarif, N., & Haryanto, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. *Jurnal Pro Justitia*, 2(2).